

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dengan keanekaragaman hayati dan sumber daya alamnya yang melimpah, serta warisan budaya yang kaya memiliki potensi besar untuk mengembangkan ragam wisata yang menarik dan berkelanjutan. Pengembangan sektor pariwisata ini tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan negara melalui devisa, tetapi juga secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan UMKM, dan meningkatkan infrastruktur daerah. Peran pemerintah dalam pengelolaan suatu wisata sangat penting untuk memastikan manajemen yang tepat dan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang baik, investasi dalam infrastruktur, serta promosi yang efektif, pariwisata dapat menjadi penggerak ekonomi yang kuat, sekaligus memastikan pelestarian lingkungan dan warisan budaya untuk generasi mendatang.

Pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan ke suatu tempat yang bertujuan untuk rekreasi, pendidikan, pekerjaan, kuliner, petualangan dan lain-lain. Pariwisata adalah hal yang diminati oleh setiap individu maupun kelompok, karena dapat menghilangkan kejenuhan, berkembangnya kreativitas dan mampu menunjang produktivitas suatu individu maupun kelompok. Dengan menghadirkan pengalaman yang berbeda dan mendalam, pariwisata dapat memberikan dampak positif yang

signifikan terhadap produktivitas individu maupun kelompok. Melalui interaksi dengan budaya baru, lingkungan alam yang eksotis, dan pengalaman unik lainnya, pariwisata juga berperan dalam memperluas wawasan dan pemahaman antarbudaya. Selain itu, perkembangan industri pariwisata juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja dan masih banyak lagi.

Menurut Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata telah menjadi salah satu sektor pendapatan utama dalam perekonomian negara, yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan pendapatan devisa. Indonesia memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang luar biasa yang kemudian menjadikannya salah satu sektor wisata terbaik di dunia. Banyak objek wisata yang menarik wisatawan baik itu lokal maupun mancanegara, seperti pantai-pantai yang indah hingga pegunungan yang tinggi.

Sesuai dengan adanya peraturan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari dan atas beban APBD. Hal tersebut menjadi peluang yang besar bagi setiap daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah perlu meningkatkan pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menemukan inovasi kreatif untuk mengembangkan potensi-potensi yang menjadi sumber PAD-nya. Semakin banyak sumber PAD yang berhasil dikembangkan, semakin besar pendapatan suatu daerah.

Sebagai salah satu aspek yang memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah, alangkah baiknya jika pariwisata dikelola dengan baik, untuk itu diperlukan keterlibatan dari pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaannya. Dalam pengelolaannya pariwisata harus dikelola secara terstruktur dan menyeluruh, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal. Peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur seperti beberapa fasilitas, melakukan koordinasi antara

aparatur pemerintah dengan pihak swasta, mengatur dan melakukan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri.

Pemerintah mempunyai wewenang dalam mengatur, menyediakan, dan memerintahkan berbagai infrastruktur yang berhubungan dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab penuh dalam menentukan arah perjalanan suatu wisata. Pemerintah berupaya keras dengan merancang rencana dan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor ini, yang mencakup eksplorasi, inventarisasi, dan pengembangan objek wisata yang ada untuk menarik minat wisatawan. Kebijakan yang ditempuh pemerintah merupakan acuan bagi stakeholder yang lain di dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Peran pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan objek wisata sangat penting terutama dalam mendukung dan memfasilitasi objek wisata tersebut. Menurut Pitana dan Gayatri, terdapat 3 peran pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan objek wisata yaitu sebagai motivator, fasilitator dan dinamisator. Peran pemerintah sebagai motivator berfungsi sebagai penggerak yang mendorong masyarakat dan pelaku pariwisata untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan potensi wisata. Ini termasuk memberikan dorongan mental dan sumber daya untuk memulai atau meningkatkan usaha pariwisata di daerah tersebut. Peran Pemerintah Daerah sebagai Motivator dalam pengembangan pariwisata diperlukan agar usaha pariwisata terus

berjalan, Pemerintah daerah merupakan lembaga yang mempunyai legitimasi atau kedudukan yang dimana pada posisi statusnya mempunyai kekuasaan sehingga sangat berperan besar dalam memberikan motivator kepada pihak-pihak sektoral yang akan mendukung kegiatan peningkatan potensi pariwisata yang ada di wilayah kekuasaanya.

Pemerintah disamping berperan sebagai motivator, pemerintah juga berperan penting dalam pemberian fasilitas pengembangan atau disebut sebagai Fasilitator. Sebagai fasilitator pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang mendukung bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata. Ini meliputi penyediaan infrastruktur, pelatihan, dan dukungan teknis kepada masyarakat dan pelaku usaha. Peran Fasilitator merupakan peran Pemerintah Daerah sebagai penyedia segala fasilitas yang mendukung pengelolaan peningkatan potensi pariwisata yang ada di wilayah otonominya serta dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya, peran ini sendiri dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Pemerintah juga berperan dalam menjembatani kepentingan berbagai pihak untuk memastikan kolaborasi yang efektif dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah juga berperan sebagai dinamisator, yang dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat berinovasi dan mengadaptasi strategi untuk mengelola potensi pariwisata dengan lebih baik. Ini termasuk memfasilitasi kerjasama antara

sektor publik dan swasta serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata.

Salah satu daerah di Indonesia yang cukup terkenal dengan beberapa destinasi wisata yang cukup menarik dan beragam yaitu daerah Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan yang sering di sebut-sebut sebagai "*Land of The Heavenly Kings*". yang memiliki paling sedikit 8 (delapan) objek wisata unggulan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki beragam destinasi wisata, yang potensi wisata alamnya begitu kaya dan perlu dikelola dengan baik dan secara agresif diperkenalkan sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisatawan baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Oleh karena itu dibutuhkan upaya pengembangan potensi wisata di beberapa titik objek wisata yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Tana Toraja. Dengan demikian pendapatan asli daerah melalui retribusi sektor pariwisata dapat meningkat dan menjadi bukti nyata keberhasilan otonomi daerah di Kabupaten Tana Toraja.

Kabupaten Tana Toraja memiliki empat jenis objek wisata utama di Kabupaten Tana Toraja yaitu wisata alam, sejarah, seni dan budaya, serta agrowisata. Melihat potensi yang dimiliki daerah Kabupaten Tana Toraja, maka sangat penting pengembangan di setiap objek wisata untuk meningkatkan pendapatan daerah. Untuk jenis wisata alam meliputi beberapa objek wisata yakni buntu burake, sa'pak bayo- bayo, air tejun

sarambu, air terjun talando tallu, kolam alam tilangnga, gunung kandora, tebing romantis, dan danau assa'. Kemudian untuk jenis wisata sejarah meliputi objek wisata kuburan batu seperti objek wisata lemo dan objek wisata suaya, serta beberapa rumah adat tongkonan seperti rumah atap batu tumakke dan tongkonan sillanan. Sementara untuk jenis objek wisata seni dan budaya meliputi pusat pembuatan kain tenun, ukiran, miniatur atau tau-tau di objek wisata lemo, dan upacara-upacara adat. Dan yang terakhir yaitu jenis objek wisata agro, objek wisata ini merupakan salah satu unggulan tana toraja yakni agro wisata pango-pango dan perkebunan kopi bolokan. Objek wisata di Kabupaten Tana Toraja tergolong banyak, ada sekitar 80 objek wisata, dimana 24 objek wisata dikelola secara mandiri yang belum dikelola dengan baik dan masih terdapat beberapa yang dalam proses penataan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Pada tahun 2015 Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Tana Toraja khususnya pada pemasukan PAD sebesar Rp158.508.451 dan kontribusi dari sektor Pariwisata mencapai Rp269.308.289, kemudian pada tahun 2019 meningkat mencapai Rp5.324.310.052, hal ini membuktikan bahwa *income* dari pengunjung objek wisata baik lokal maupun mancanegara sangat menjanjikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah banyaknya destinasi wisata yang dibuat dan dibuka, hingga wisata di Tana Toraja bisa dinikmati oleh wisata lokal maupun mancanegara.

Tabel 1.1 Rekapitan penerimaan retribusi tempat rekreasi/objek wisata tahun 2022 & 2023

No.	Objek Wisata	Jumlah Penerimaan	
		2022	2023
1.	Objek Wisata Burake	Rp1.844.135.000,00	RRp1.613.899.000
2.	Objek Wisata Pango-Pango	Rp275.880.000,00	Rp381.436.000
3.	Objek Wisata Tilanga'	Rp30.639.000,00	Rp43.524.500
4.	Objek Wisata Lemo	Rp18.272.000,00	Rp19.192.000
5.	Objek Wisata Karuaya	Rp400.000,00	Rp1.568.000
6.	Objek Wisata Pasar Seni	Rp28.000.000,00	Rp54.000.000
7.	Objek Wisata Suaya	Rp1.070.000,00	-
8.	Tunggakan Retribusi Tempat Rekreasi tahun sebelumnya	Rp81.117.000,00	Rp76.368.000,00
Jumlah		Rp746.812.500,00	Rp2.189.987.500

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja, 2024

Dari tabel rekapitan penerimaan retribusi tempat rekreasi/objek Wisata diatas yang ada di Kabupaten Tana Toraja, penulis tertarik untuk meneliti objek wisata Buntu Burake yang saat ini menjadi tujuan wisata nomor satu di Tana Toraja. Berdasarkan data penerimaan retribusi tempat rekreasi di Tana toraja tahun 2022 & 2023 diatas, membuktikan bahwa penerimaan retribusi pada objek wisata buntu burake menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Tana Toraja.

Patung Yesus di Buntu Burake menjadi ikon wisata kabupaten tana toraja yang beraada di atas bukit setinggi 1.700 meter dengan tinggi 45 meter dari coran perunggu. Ketinggiannya melebihi patung Yesus di Brazil.

Objek wisata buntu burake dilengkapi dengan 7.777 anak tangga yang menjadi salah satu akses menuju patung yesus memberkati. Selain itu, terdapat juga jembatan kaca yang dibangun sejak 2018 menggunakan kaca tempered glass SNI dan menghabiskan APBD sebesar 4 miliar. Objek wisata Buntu Burake yang terkenal dengan Patung Yesus Kristus Memberkati ini memiliki 3 macam biaya retribusi diantaranya Tiket masuk untuk wisatawan lokal adalah Rp 15.000, wisatawan mancanegara Rp 50.000, dan anak-anak Rp 5.000. Pada hari biasa, rata-rata pengunjung mencapai 100 orang, sementara pada hari libur atau hari raya seperti natal dan lebaran, jumlah pengunjung dapat mencapai sekitar 1.000 orang.

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan wisatawan Objek Wisata Buntu Burake tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Wisatawan	
	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara
2019	786.535	1.300
2020	54.254	100
2021	41.723	-
2022	74.637	-
2023	200.823	8

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja, 2024

Tabel 1.3 Rekapitulasi Pengunjung Objek Wisata Religi Buntu Burake tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Kunjungan
1.	Januari	24.687
2.	Februari	8.794
3.	Maret	5.942
4.	April	19.073
5.	Mei	14.684
6.	Juni	11.359
7.	Juli	24.526

8.	Agustus	11.818
9.	September	9.482
10.	Oktober	9.649
11.	November	14.953
12.	Desember	45.861
Jumlah		200.831

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja, 2024

Berdasarkan data kunjungan objek wisata Buntu Burake di atas, dapat dilihat bahwa ternyata wisatawan yang berkunjung ke objek wisata buntu burake mulai berkurang dari tahun 2020. Dengan demikian, kawasan Wisata Buntu Burake memerlukan pengembangan melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas pendukung wisata. Tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan kepuasan mereka, sehingga mereka ingin kembali mengunjungi tempat ini. Terdapat pula beberapa fasilitas yang kurang dan terbengkalai di objek wisata buntu burake seperti akses anak tangga menuju patung yesus saat ini penggunaanya kurang optimal.

Selain itu, terdapat pula jembatan kaca di objek wisata Buntu Burake yang dulunya menjadi salah satu daya tarik wisatawan kini juga sudah tidak digunakan, adanya jembatan kaca ini merupakan salah satu bentuk atraksi wisata yang menawarkan pengalaman berjalan di atas kaca dengan ketinggian 1.200 meter di atas tebing dan panjang sekitar 90 meter. Jembatan kaca di objek wisata buntu burake ini membuat wisatawan yang berkunjung ke objek wisata buntu burake menikmati indahnya panorama Tana Toraja dari ketinggian. Namun, hampir 4 tahun jembatan ini terbengkalai dan tidak dibuka lagi untuk dinikmati oleh wisatawan yang

datang. Hal ini menjadi salah satu keluhan para wisatawan, selain itu masih ada beberapa fasilitas yang harus dilengkapi di objek wisata buntu burake yang menjadi faktor pengaruhi kepuasan wisatawan

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa di objek wisata buntu burake ada beberapa hal yang bisa dikembangkan dan dikelola lebih baik lagi untuk menarik para pengunjung wisata yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memberikan citra positif bagi Kabupaten Tana Toraja. Namun, apakah pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja telah mengelola sektor pariwisata ini dengan baik, terkhusus dinas pariwisata? Apa saja kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata? Oleh karena itu, Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BUNTU BURAKE DI KABUPATEN TANA TORAJA”** untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah berperan dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata khususnya objek wisata buntu burake di Kabupaten Tana Toraja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang sebelumnya, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran motivator pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja?

2. Bagaimana peran fasilitator pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja?
3. Bagaimana peran dinamisor pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah sebelumnya, diperoleh tujuan untuk mengetahui :

1. Bagaimana peran motivator pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja.
2. Bagaimana peran fasilitator pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja.
3. Bagaimana peran dinamisor pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Akademik

Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan pertimbangan yang dapat menunjang, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada maupun untuk mendukung penelitian yang akan datang.

b. Manfaat Metodologis

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan masukan dalam mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir bagi penulis atau ketika akan melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pembahasan.

c. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi pengelolaan dan pengembangan objek wisata Buntu Burake yang ada di Kabupaten Tana Toraja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Peran Pemerintah Daerah

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. (Medi, 2018) Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi social tertentu, bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Menurut Poerwodarminta (1995) dalam (Dewi et al., 2021) menyatakan bahwa peran merupakan suatu tindakan atau usaha yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Dimana peran merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Soekanto (2004), menyebutkan bahwa peran dapat dibagi menjadi 3 cakupan yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dan masyarakat, peran dalam arti merupakan

rangkaianrangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan ke masyarakat.

- b. Peran adalah suatu konsep tentang yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting bagi struktur organisasi sosial masyarakat.

Kemudian menurut Riyadi (2002), peran dapat diartikan sebagai suatu orientasi dan konsep dari hal yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, seseorang baik itu individu maupun organisasi harus berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungan sekitarnya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural. Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang semuanya harus menjalankan berbagai peran sesuai dengan harapan atau tujuan.

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan atau dapat pula diartikan suatu cara, hal urusan, dan sebagainya dalam memerintah. Sehingga secara etimologi, pemerintahan diartikan sebagai tindakan yang terus menerus atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal dan tata cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki. Menurut Ndraha (2003:6) pemerintah

adalah Organ yang berwenang dalam memproses pelayanan publik dan berkewajiban untuk memproses pelayanan civil bagi setiap orang, melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan yang di perintah. (Suharyadi & Insani, 2016). Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. (Medi, 2018) Sebagaimana dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 17 yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam melakukan pembangunan kepariwisataan, sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum.
3. Memelihara dan mengembangkan serta melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Menurut Pitana dan Gayatri (2005) dalam (Anggraeni & Fadlurrahman, 2018) mengemukakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah sebagai:

a. Motivator

Peran Pemerintah Daerah sebagai Motivator dalam pengembangan pariwisata diperlukan agar usaha pariwisata terus berjalan, Pemerintah daerah merupakan lembaga yang mempunyai legitimasi atau kedudukan yang dimana pada posisi statusnya mempunyai kekuasaan sehingga sangat berperan besar dalam

memberikan motivator kepada pihak-pihak sektoral yang akan mendukung kegiatan peningkatan potensi pariwisata yang ada di wilayah kekuasaanya (Pitana dan Gayatri 2005). Menurut Mudjiono (2009) mengatakan bahwa motivator atau motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan pengarahaan perilaku manusia. Dalam pengelolaan pariwisata, peran Pemerintah daerah sebagai motivator yang mendorong masyarakat untuk bergerak mengelola dan mengembangkan potensi wisata. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.

b. Fasilitator

Sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung pengembangan objek wisata. Adapun pada prakteknya pemerintah biasa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat. Peran Fasilitator merupakan peran Pemerintah Daerah sebagai penyedia segala fasilitas yang mendukung pengelolaan peningkatan potensi pariwisata yang ada di wilayah otonominya, peran ini sendiri dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Peran Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi

pelaksanaan pembangunan atau menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah, seperti: 1) Menyediakan Sarana dan Prasarana Menyediakan alat maupun bangunan yang membuat pengunjung betah yaitu dengan menyediakan mushollah, toilet, villa, gazebo dan berbagai fasilitas lainnya. 2) Memfasilitasi Aktivitas Masyarakat Memenuhi kebutuhan yang diinginkan pengunjung agar ingin datang lagi, seperti menyediakan kamar mandi, air bersih dan listrik. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memberikan atau menyediakan fasilitas dalam hal ini Pemerintah daerah sebagai pengelola objek wisata.

c. Dinamisor

Peran Pemerintah sebagai dinamisor adalah memobilisasi sumber daya dalam pembangunan yaitu dengan mengerakan partisipasi multi pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik dalam proses pembangunan, kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pihak swasta dan masyarakat sendiri harus dilakukan secara terencana serta pemberian bimbingan dan pengarahan harus dilakukan dengan intensif dan efektif. Peran Pemerintah sebagai dinamisor adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendalakendala dalam proses pembamgunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Peran Pemerintah daerah sebagai dinamisator yaitu: 1) Memberikan Bimbingan dan Pengarahan 2) Memberikan Pelatihan.

2.1.2 Pariwisata dan Objek Wisata

Secara Etimologis Pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “pari” yang artinya “banyak, berkali-kali, berputar-putar” dan “wisata” yang berarti “perjalanan atau bepergian”. Dari arti kata tersebut pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan yang dilakukan secara berulang atau berkali-kali ke suatu tempat dengan tujuan dan maksud tertentu.

Organisasi pariwisata dunia, mendefenisikan pariwisata sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal seorangng di luar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja ditempat yang dikunjungi tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, menyatakan bahwa:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sebagian atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
- e. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- f. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam suatu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- g. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- h. Pengusaha pariwisata adalah orang-orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- i. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan penyelenggaraan pariwisata.

- j. Kawasan strategi pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh dalam suatu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan religi semakna dengan agama yaitu berkumpul bersama.

Freuler dalam Pendit (2002) merumuskan pengertian pariwisata dalam arti modern yaitu pariwisata merupakan fenomena dari jaman sekarang yang mana didasarkan atas kebutuhan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam atau budaya dan pada khususnya disebabkan oleh meningkatnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat.

Pariwisata mencakup beberapa hal penting dalam pengembangannya salah satunya yaitu potensi wisata. Pendit (1999) menerangkan bahwa potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang ada di sebuah daerah tertentu dan bisa dikembangkan menjadi objek wisata. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi adalah daya, kekuatan, atau

kemampuan baik yang berasal dari lingkungan alam maupun budaya yang dapat mendukung kehidupan manusia maupun suatu proses yang disebabkan oleh budi daya manusia yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Potensi pariwisata merupakan suatu kemampuan dari objek wisata yang berasal dari alam seperti keindahan alam, iklim, pantai, pegunungan, goa dan sebagainya maupun hasil budi daya manusia seperti candi, monumen, peninggalan purbakala, kesenian dan sebagainya yang dapat dikembangkan untuk mendukung kemajuan kepariwisataan di suatu daerah tertentu. Potensi pariwisata yang dikembangkan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah yang akan menjadi tujuan wisata. Potensi pariwisata yang juga disebut dengan modal atau sumber daya wisata yang kelstarian dan pengembangannya sangat tergantung dari kemampuan dan kemauan manusia.

Soekadijo (1997) menyatakan bahwa “Modal atau potensi pariwisata dapat berupa alam, budaya dan manusia itu sendiri”. Lebih lanjut mengenai potensi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Potensi alam, yang dimaksud dengan potensi alam adalah alam fisik, fauna, dan floranya.
- b. Potensi kebudayaan, yang dimaksud dengan kebudayaan di sini adalah kebudayaan dalam arti luas, yang dimana tidak hanya meliputi kesenian tetapi juga meliputi adat istiadat dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat.

- c. Potensi manusia, manusia dapat menjadi atraksi wisata yang dapat menarik kedatangan Wisatawan. Wisatawan dapat tertarik untuk mengunjungi suatu daerah karena sikap dari masyarakat setempat.

Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang memiliki daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut (Jayanti, 2019). Objek wisata terbagi menjadi dua yang pertama adalah objek wisata yang dari perwujudan ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta sejarah bangsa dan tempat mempunyai daya tarik untuk dikunjungi, yang kedua adalah objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan alam dan tata lingkungan.

Peraturan Pemerintah No.24/1979 menyatakan bahwa Objek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat keadaan yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi. Berdasarkan uraian tersebut, objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

2.1.3 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dan mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung demi kelangsungan pengembangan pariwisata (Suwardjoko:2007).

Menurut Pitana (2005), pengembangan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan atau meningkatkan potensi suatu tempat atau daerah yang perlu ditata sedemikian rupa, baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang hal baru. Sehingga pengembangan pariwisata merupakan suatu usaha untuk mewujudkan kolaborasi dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata yang mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. Menurut Suwanto (2002), unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata meliputi:

a. Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada: 1) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih. 2) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 3) Adanya spesifikasi/ciri khusus yang bersifat langka. 4) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan. 5) Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan dan lain-lain). 6) Obyek wisata budaya dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

b. Prasarana Wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya.

c. Sarana Wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

Menurut Isdarmanto : 2017 dalam (Buntugayang, 2023), pengembangan pariwisata berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh beberapa unsur utama:

1. Daya Tarik Wisata (*Attractions*)

Daya tarik wisata adalah elemen penting yang menarik wisatawan ke destinasi tertentu. Setiap destinasi memiliki daya tarik yang berbeda-beda, baik yang berasal dari alam seperti pantai, gunung, danau, maupun buatan manusia seperti seni budaya dan bangunan bersejarah. Daya tarik ini menciptakan motivasi bagi wisatawan untuk berkunjung.

2. Fasilitas dan Jasa Pelayanan Wisata (*Amenities*)

Amenitas mencakup fasilitas pendukung yang memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di destinasi, seperti akomodasi, restoran, toilet umum, tempat parkir, dan klinik kesehatan. Fasilitas-fasilitas ini penting untuk memberikan kenyamanan dan memenuhi kebutuhan wisatawan selama perjalanan mereka.

3. Kemudahan untuk Mencapai Destinasi Wisata (*Accessibility*)

Aksesibilitas adalah kemudahan yang tersedia untuk mencapai destinasi wisata. Ini mencakup infrastruktur transportasi seperti jalan raya, sarana transportasi umum, dan rambu-rambu penunjuk jalan. Aksesibilitas yang baik sangat penting untuk menarik wisatawan dan memudahkan mereka mencapai destinasi.

Adapun menurut (Yoeti, 1985), pengembangan pariwisata perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu:

1. Wisatawan (Tourist) Harus diketahui karakteristik dari wisatawan, dari negara mana mereka datang, usia, hobi, dan pada musim apa mereka melakukan perjalanan.
2. Transportasi Harus dilakukan penelitian bagaimana fasilitas transportasi yang tersedia untuk membawa wisatawan ke daerah tujuan wisata yang dituju.
3. Atraksi/obyek wisata Atraksi dan objek wisata yang akan dijual, apakah memenuhi tiga syarat yaitu, Apa yang dapat dilihat

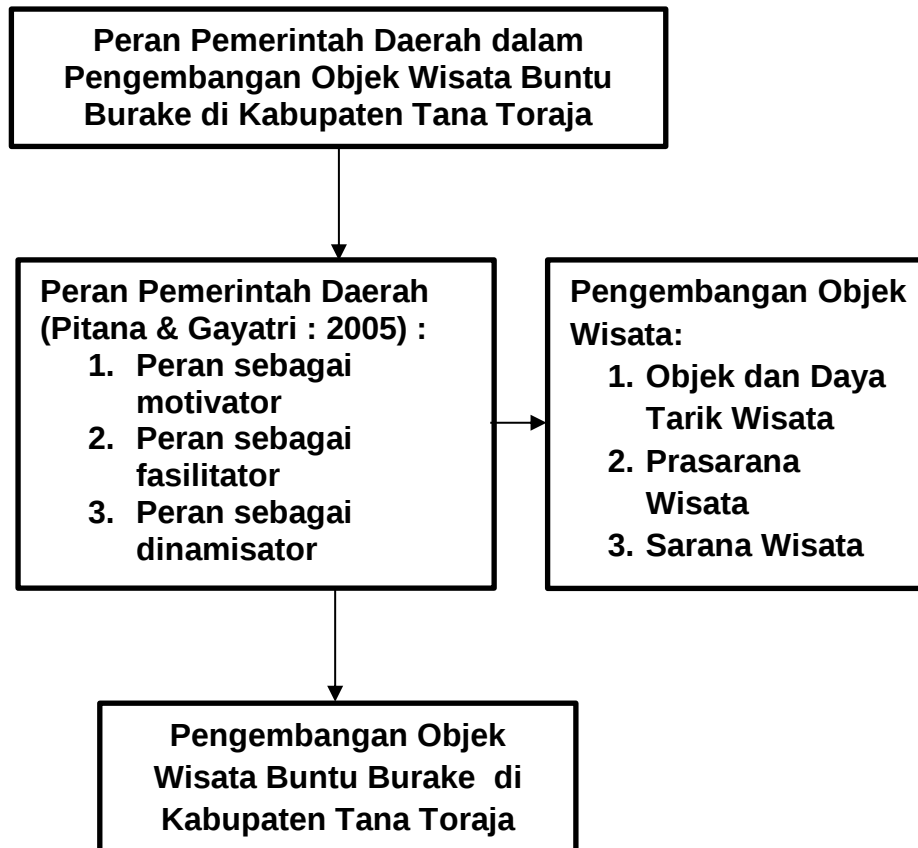
(something to see), apa yang dapat dilakukan (something to do), dan ppa yang dapat dibeli (something to buy).

4. Fasilitas pelayanan Fasilitas apa saja yang tersedia di DTW tersebut, bagaimana akomodasi perhotelan yang ada, restaurant, pelayanan umum seperti Bank/money changers, kantor pos, telepon/teleks yang ada di DTW tersebut.
5. Informasi dan promosi Diperlukan publikasi atau promosi, kapan iklan dipasang, kemana leaflets/ brosur disebarakan sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata dan wisatawan cepat mengambil keputusan pariwisata di wilayahnya dan harus menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. pengembangan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Ada pun permasalahan yang ingin peneliti lihat dari penelitian ini yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan objek

wisata buntu burake di Kabupaten Tana Toraja”. diantaranya akan dijabarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah, 2024